

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti (2014:2) adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”

Menurut Abdul Halim (2012:20) definisi akuntabilitas publik sebagai berikut :

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2013:9) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut :

“Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.”

Menurut Indra Bastian (2010:385) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.”

Serta menurut Deddi Nordiawan (2008:129) Akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas Publik adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

Definisi akuntabilitas menurut Lloyd, et al dalam Alnoor Ebrahim (2010) sebagai berikut :

“The process through which an organization makes a commitment to respond to and balance the needs of stakeholders in its decision making process and activities, and delivers against this commitment.”

Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik yaitu sebagai berikut :

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Menurut Ihyaul Ulum (2010:40) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.”

Sedangkan Menurut Mursyidi (2013:44) akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

“Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Kemudian, akuntabilitas menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:11) yaitu sebagai berikut :

“Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik diperlukan untuk memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP, Modul I 2000:43) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain itu, ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel menurut Finner dalam Joko Widodo (2010:104) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* diantaranya sebagai berikut :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

2.1.1.2 Tipe – Tipe Akuntabilitas Publik

Tipe Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42) yaitu :

1. Akuntabilitas Internal
2. Akuntabilitas Eksternal

Berikut ini penjelasan dari beberapa macam tipe akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Internal
Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas Eksternal
Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntabilitas juga dibedakan menjadi beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono (2007:50) mengemukakan ada lima perspektif akuntabilitas, yaitu :

- a. Akuntabilitas Administratif/organisasi
Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
- b. Akuntabilitas Legal
Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akuntabilitas Politik
Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-

sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

d. Akuntabilitas Profesional

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

e. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi (2015:9) yaitu : Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*), Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*).

Adapun penjelasan dari dua macam akuntabilitas publik diatas adalah sebagai berikut :

- Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

- Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.

Ihyaul Ulum (2010:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan
2. Akuntabilitas Kinerja

Berikut penjelasan dua jenis akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai :

- a. Integritas Keuangan
- b. Pengungkapan
- c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Sasaran pertanggungjawaban ini yaitu laporan keuangan yang disajikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya tiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

a. Integritas Keuangan

Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan. Integritas laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan secara jujur.

b. Pengungkapan

Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara
- b. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
- c. Undang-undang APBN
- d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
- e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah

- f. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah
- 2. Akuntabilitas Kinerja
 Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menggambarkan adanya kemauan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang dapat diciptakan pemerintah agar lebih baik lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki sense of accountability dan mempertanggungjawabkan keberhasilan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas pemberian amanah kepada pejabat pemerintahan.

Mardiasmo (2009:21) pun membagi dua macam Akuntabilitas Publik yang terdiri dari :

- 1. Pertanggungjawaban Vertikal (*Vertical Accountability*)
- 2. Pertanggungjawaban Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban Vertikal itu sendiri adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit pengelolaan dana kepada pemerintah daerah , pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan Pertanggungjawaban Horisontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang muncul adanya perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Selain itu menurut Revrisond Baswir (2000:7) menyatakan bahwa laporan keuangan

pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, maupun politik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Akuntabilitas pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberikan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan masyarakat beserta penggunaannya.

Akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi menjadi empat bagian menurut Revrisond Baswir (2000:7) yaitu :

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dari kebijakan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil Program dan Kegiatan Pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, dan efektifitas

Selain itu menurut J.D Stewart dalam Nico Andrianto (2007:23-24) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima jenis, yaitu :

1. *Policy Accountability*,
2. *Program Accountability*,
3. *Performance Accountability*,
4. *Process Accountability*,
5. *Probity and Legality Accountability*.

Berikut adalah penjelasan dari lima jenis akuntabilitas publik adalah :

- a. *Policy Accountability*, yaitu akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat.
- b. *Program Accountability*, yaitu akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai.
- c. *Performance Accountability*, yaitu akuntabilitas atas pencapaian-pencapaian kegiatan yang efisien.

- d. *Process Accountability*, yaitu akuntabilitas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.
- e. *Probity and Legality Accountability*, yaitu akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dan sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.4 Dimensi Akuntabilitas Publik

Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut (Hopwood dan Tomkins,1984; Elwood, 1993) dalam Mahmudi (2013:9) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

Berikut dibawah ini merupakan penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas publik :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.
2. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Sedangkan menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21-22)

menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas.

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) ada lima dimensi akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga harus

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi dapat dikatakan dengan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Definisi Transparansi menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:11) sebagai berikut :

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut David O. Renz (2016:103) definisi transparansi yaitu sebagai berikut :

“Transparency which involves collecting information and making it available and accessible for public scrutiny.”

Adapun menurut Amitai Etzioni (2010:1) pengertian transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparency is generally defined as the principle of enabling the public to gain information about the operations and structures of a given entity. Transparency is often considered synonymous with openness and disclosure, although one can find subtle differences among these terms.”

Kemudian transparansi menurut Mursyidi (2015:44) yaitu sebagai berikut :

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Secara harafiah transparansi adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh atau keterbukaan, dengan demikian transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) pengertian transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.”

Sedangkan menurut Deddi Nordiawan (2008:129) Transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Konsep transparansi menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD 2004:66) dalam Arifin Tahir (2011:164) yaitu :

“As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organizations (NGO’s) or “civil society groups” as well as educated and diverse populations.”

Menurut Arifin Tahir (2011:162) Transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.”

Konsep transparansi adalah nilai utama dari sistem pemerintahan, konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakikatnya ada kaitan dengan percepatan dan pengaruh organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini merupakan tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat.

Transparansi menurut Mardiasmo (2009:30) adalah sebagai berikut :

“ Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.”

Menurut Holzner (2006:114) transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparency is a value likely to change the relation between citizens and authorities, between professionals and their clients or patients, and between corporation and theirs workers, customers, investors, and communities.”

Sedangkan menurut Nico Andrianto (2007:20) menjelaskan bahwa transparansi adalah :

“Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.”

Selain itu Moh Mahsun (2015:32) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut :

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Bushman & Smith (2003:76) mendefinisikan transparansi sebagai berikut :

“Perusahaan sebagai ketersediaan relevansi yang tersebar luas, informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode yang terkait posisi keuangan, kesempatan investasi, pemerintah, nilai dan risiko perusahaan yang bersifat umum.”

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan dan informasi tentang kebijakan yang diambil dan hasil-hasil yang telah dicapai yang dapat diketahui publik.

2.1.2.2 Jenis Transparansi

Bushman, Piotroski, dan Smith (2003:76) membagi dua jenis transparansi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi Keuangan
2. Transparansi Pemerintah

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai jenis transparansi menurut Bushman, Piotroski, dan Smith (2003:76) :

1. Transparansi Keuangan
Transparansi keuangan tingkat negara disusun berdasarkan intensitas pelaporan perusahaan, waktu pelaporan, jumlah analisis, dan media penyebarannya. Dimensi yang digunakan dalam transparansi keuangan pemerintah daerah yaitu transparansi proses, transparansi kejujuran dan transparansi hukum dan transparansi kebijakan
2. Transparansi Pemerintah.

Sedangkan dimensi yang digunakan transparansi pemerintah yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi, prosedur yang digunakan sudah cukup baik dalam kecakupan sistem informasi manajemen, prosedur administrasi, komunikasi publik oleh pemerintah. Berikut adalah penjelasan dimensi transparansi keuangan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik.

Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan transparansi agar menjadi efektif dalam pelaksanaannya, adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan apakah sumber-sumber diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang legal dan menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menunjukkan sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber-sumber serta status dari sumber anggaran keuangan.
3. Menunjukkan bagaimana pemerintah atau unit-unitnya membelanjakan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya.
4. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah atau unit-unitnya untuk membelanjai aktifitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya
1. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi keuangan pemerintah, untuk menetapkan, apakah posisi keuangan pemerintah membaik atau memburuk
2. Menyediakan informasi untuk menetapkan apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada kemakmuran rakyat sekarang dan masa depan
3. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja unit-unit pemerintah dalam ukuran biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian aktivitas.
4. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas aset dan kewajibannya.
5. Mengungkapkan kontraktual atas sumber-sumber dan resiko kehilangan potensial dari sumber-sumber.
6. Menyediakan informasi untuk dapat memahami sifat, cakupan, dan luasnya aktivitas keuangan pemerintah dalam hubungan dengan keseluruhan ekonomi.

Proses transparansi menurut Smith (2004:66) dalam Arifin Tahir (2011:164) adalah sebagai berikut :

1. *Standard Procedural Requirements* (Persyaratan Standar Prosedur).
Proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. *Consultation Processes* (Proses Konsultasi)
Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat.

3. *Appeal Rights* (Permohonan Izin)

Pelindung utama dalam proses pengaturan, standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Manfaat transparansi menurut Nico Andrianto (2007:21), terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu :

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga
- d. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
- e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha

2.1.2.3 Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2009:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi :

1. Informatif (*Informative*)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

- c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan
Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good*

Governance menurut Edah Jubaedah (2008:66), yaitu :

- a. Ketersediaan Payung hukum bagi akses informasi publik
- b. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi
- d. Ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik
- e. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna yang membutuhkan maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Kualitas adalah suatu keadaan terbaik dalam batas-batas kondisi tertentu sesuai dengan keinginan.

Definisi dari Kualitas menurut Kotler dan Keller (2009:49) yaitu sebagai berikut :

“Kualitas adalah seluruh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri dan sifat yang memiliki pengaruh agar dapat mencapai kepuasan dari kebutuhan yang diharapkan.

Laporan Keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama periode pelaporan tertentu.

Laporan keuangan menurut Kasmir (2013:7) adalah sebagai berikut :

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Munawir (2010:2) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah :

“Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Sedangkan menurut Sujarweni (2015:88) laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik.”

Jadi Kualitas Laporan Keuangan menurut Deddi Nordiawan (2010:44) adalah sebagai berikut :

“Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Menurut Mursyidi (2013:44) Entitas Pelaporan adalah unit yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari :

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Saluran Organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas, dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya (Deddi Nordiawan 2008:128). Laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah :

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- d. Pemerintah

Pemakai laporan keuangan sektor publik menurut Moh Mahsun (2015:116) dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu :

1. Lembaga Pemerintah
2. Investor dan Kreditor
3. Penyedia Sumber daya
4. Badan Pengawas
5. Konstituen.

Selain itu Mardiasmo (2009:172) menyatakan bahwa para pengguna informasi kepada berbagai kelompok pemerintah adalah sebagai berikut :

- Masyarakat
- Masyarakat Pembayar Pajak dan Pemberi bantuan
- Kreditor dan Investor
- Parlemen dan Kelompok Politik
- Badan Legislatif dan Badan-badan lainnya
- Pemerintah lain
- Analisis Ekonomi dan Keuangan

Berikut adalah penjelasan pengguna informasi kepada berbagai kelompok pemerintah :

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaran yang dilakukan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi-informasi yang berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmennya.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
5. Badan Legislatif dn Badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan mengawasi. Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan Keuangan pemerintah tersebut memberikan informasi yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber dana dan kondisi keuangan maupun kinerja.
6. Pemerintah lain, Badan Internasional dan Penyedia Sumber Lain. Para investor dan kreditor menyebutkan bahwa pemerintah lain, badan

internasional menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu menaruh perhatian terhadap kebijakan-kebijakan.

7. Analisis Ekonomi dan Keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis, dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain.

2.1.3.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah sudah seharusnya menyajikan informasi yang benar, informatif dan bermanfaat bagi para penggunanya dalam menilai akuntabilitas dan membuat dan mengambil keputusan. Tujuan Pelaporan keuangan menurut Mursyidi (2013:45) :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik menurut Sujarweni (2015:89) yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan
Laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.

4. Kelangsungan Operasi

Laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan dapat memberi kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada masyarakat. Dan juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Selanjutnya tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintah

yaitu :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintahan.
2. Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Pelaporan keuangan sektor publik seharusnya menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yang dikemukakan

oleh Moh Mahsun (2015:33) yaitu dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Selain itu Mardiasmo (2009:37) menyatakan jika tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lainnya yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
6. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
7. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintah.
8. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target.

9. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equity*).

Tujuan Pelaporan Keuangan lainnya menurut Indra Bastian (2009:96)

adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial.
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.
- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
- d. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan di dalamnya.
- e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya, jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Namun secara spesifik , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

2.1.3.3 Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Deddi Nordiawan 2008:128). Setiap entitas memiliki kewajiban melaporkan apa yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai pada suatu periode tertentu untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak atau mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundnag-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*) yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:21) setiap pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Peranan pelaporan keuangan menurut Moh Mahsun (2015:31) adalah sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok menurut Mursyidi (2013:45) terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok menurut Indra Bastian (2009:139) adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Penjabaran dari komponen tersebut yaitu :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- b. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
- c. Laporan Arus Kas
Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Sedangkan komponen laporan keuangan pemerintah daerah menurut Abdul Halim (2014:44) laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgetary Report*)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
2. Pelaporan Finansial (*Financial Report*)
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Arus Kas (LAK)
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah RI

Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
 Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Berikut penjelasan masing-masing unsur sebagai berikut :
 - a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- c. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 7. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
 - b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
 - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
 - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
 - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
 - f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
 - g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah menurut Deddi Nordiawan (2010:45) yaitu sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi
2. Nilai Historis (*Historical Cost*)
3. Realisasi (*Realization*)
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)
5. Periodisitas (*Periodicity*)

6. Konsistensi (*Consistency*)
7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip pelaporan keuangan :

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk-LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam- LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah. Tetapi jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk neraca berarti dalam aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sejumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis dapat lebih diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun maka pendapatan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak dapat penekanan sebagaimana diprektekan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga entitas pelaporan dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Penyajian Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun terdapat pula pertimbangan sehat yang tidak diperkenankan aset lain atau pendapatan yang terlampau rendah, atau

mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Prinsip Akuntansi dan laporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menurut Moh Mahsun (2015:36) :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)
- e. Prinsip Periodisitas
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
- h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Berikut adalah penjelasan dari delapan prinsip tersebut yaitu :

- a. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
- b. Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan serta kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
- c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*match-ing cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

- d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimilikinya dapat ditentukan Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
- f. Prinsip Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode yang akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.1.3.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan yaitu ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat dipenuhi kewajibannya. Karakteristik ini memiliki empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitasnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:14) adalah sebagai berikut :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat di bandingkan
4. Dapat di pahami

Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah :

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat Waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajianannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

- Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - Netralitas
- c. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- d. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yang dinyatakan oleh Moh Mahsun (2015:35-36) :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil

evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan akan bercirikan memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik antara lain :

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Selain itu Indra Bastian (2009:97) juga menyatakan bahwa karakteristik kualitatif Laporan Keuangan merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif

pokok, yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan, berikut adalah penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

1. Dapat Dipahami

Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta mempunyai kemauan untuk belajar tentang informasi yang disampaikan.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, atau memprakirakan masa depan.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya.

4. Dapat Diperbandingkan

Pemakaian harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan secara relatif. Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

Menurut Halim Abdul (2012:198) menyatakan bahwa untuk menilai kualitas dari laporan keuangan, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu :

1. Relevan yaitu apabila informasi di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan. Informasi dikatakan relevan bila memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
2. Andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas.
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Deddi Nordiawan (2007:131-132), laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik adalah sebagai berikut :

- Relevan
- Andal
- Dapat Diperbandingkan
- Dapat Dipahami

Berikut dibawah ini adalah penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan :

1. Relevan
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka (*feedback value*). Selain itu, suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.
2. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3. Dapat Diperbandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna yang dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Terkait hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan penggunaan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi dari peneliti terdahulu yang bersumber dari beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang mempunyai hal serupa dengan penelitian ini dengan judul penelitian Pengaruh

Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

dapat dilihat seperti dibawah ini :

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Harry Wibawa (2015)	Akuntabilitas Publik (X1) dan Standar Pengendalian Intern Pemerintah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Hasil penelitiannya yaitu akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	Perbedaan terletak pada Variabel independen (X2) peneliti berbeda dengan peneliti terdahulu yaitu Transparansi	Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu pada variabel independen (X1) yaitu Akuntabilitas Publik dan variabel dependen (Y) yaitu Kualitas Laporan Keuangan
2	Dinie Rachmawaty (2015)	Pengaruh Akuntabilitas (X1) dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Provinsi Jawa Barat) (Y)	Hasil penelitiannya yaitu akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	Perbedaan terletak pada Unit penelitian, peneliti melakukan penelitian hanya di Pemerintahan Kota Bandung sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian pada Pemerintahan	Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah pada kedua variabel independen (X1 dan X2) yaitu Akuntabilitas dan Transparansi serta Variabel dependen (Y) Kualitas Laporan Keuangan

			pemerintah daerah.	Provinsi Jawa Barat	
3	Sri Ayu Wulandari Aswadi (2014)	Pengaruh Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) (Studi Kasus Pada Kabupaten Pinrang)	Hasil penelitiannya yaitu akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Perbedaannya terletak pada Unit Penelitian, peneliti melakukan penelitian di Pemerintahan Kota Bandung sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian di Pemerintahan Kabupaten Pinrang.	Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah pada kedua variabel independen (X1 dan X2) yaitu Akuntabilitas dan Transparansi serta Variabel dependen (Y) Kualitas Laporan Keuangan
4	Irvan Permana (2011)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Publik (Z)	Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan, maka dapat	Perbedaannya terletak pada X1 dan Z. Peneliti meneliti dua variabel yaitu Akuntabilitas Publik (X1) dan Transparansi (X2) sedangkan peneliti	Persamaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y)

			dikataka akuntabilitas publik mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	sebelumnya hanya menggunakan satu variabel yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga meneliti tentang implikasinya (Z).	
--	--	--	---	---	--

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Abdul Halim, dan M.Syam Kusufi (2012:281) disebutkan bahwa Akuntabilitas Publik merupakan dasar dari pelaporan keuangan di Pemerintah. Akuntabilitas menjadi tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah, serta dapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dengan pelaporan keuangan.

Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa laporan keuangan pemerintah daerah. (Soleh, Chabib, dan Suropto 2011:155). Selain itu

Elvira Zeyn (2011:60) menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan juga memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan maka diharapkan laporan keuangan akan dapat diperbandingkan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Permana (2011) dengan Judul penelitian yaitu Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Publik adalah Standar Akuntansi Pemerintahan dapat berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Maka dapat disimpulkan Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Oleh karena itu untuk membuat laporan keuangan berkualitas diharuskan adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan.

Senada dengan pendapat dari Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2003) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan laporan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Moses Bukenya (2014) mengenai besar pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan *“Performance information is necessary for the discharge of accountability and financial and accounting information is often emphasized in determining accountability”*. Yang berarti bahwa penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

2.2.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Sehingga dapat dikatakan transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian kualitas laporan keuangan (Mursyidi 2009).

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara bebas dan mudah tentang proses pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian transparansi dapat dikatakan sebagai pendukung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah (Arifin Tahir, 2011:165).

Penelitian yang dilakukan oleh Dinie Rachmawaty (2015:156) yaitu Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan daerah yang transparan merupakan harapan bagi masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah yang sesungguhnya.

Menurut penelitian Sri Ayu Wulandari (2014:63) adalah Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai peranan yang signifikan atau penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Transparansi dan Kualitas Laporan Keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dimana pembuatan laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk

memenuhi kebutuhan akan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Aprilianita (2015), Firna (2015), dan Zulfikar (2014). Dalam penelitian yang dilakukan Aprilianita, Firna, dan Zulfikar membuktikan bahwa transparansi dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.2.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-pencapaian tujuan yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan kejujuran (Widodo, 2011). Baik buruknya kualitas laporan keuangan dihasilkan oleh pemerintah memiliki keterkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik dalam sebuah laporan keuangan, maka laporan keuangan akan semakin relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dan dapat dikatakan dengan adanya transparansi sebagai pendukung adanya akuntabilitas yang merupakan keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Vicente Pina (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik dan transparansi mempunyai hubungan

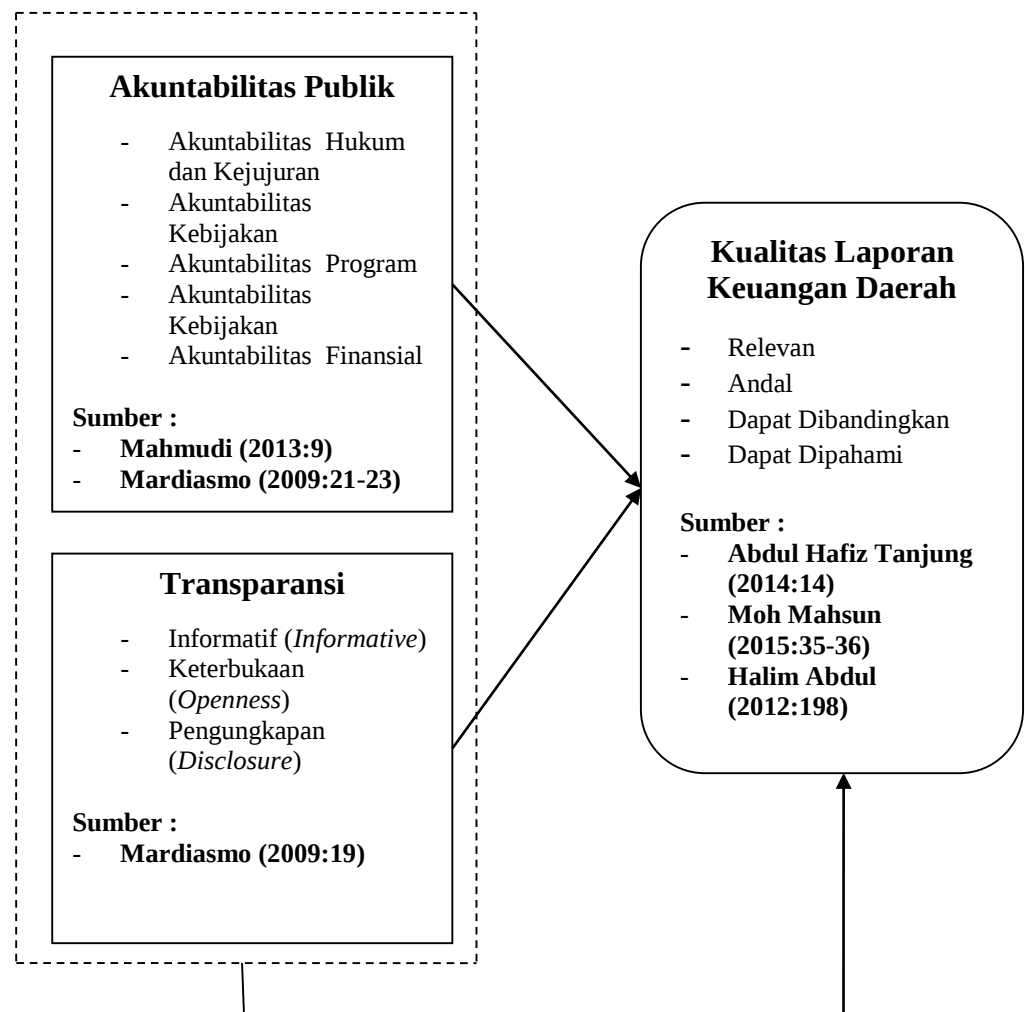
yang erat dengan kualitas laporan keuangan yaitu *“The general purpose financial statements are a primary source of financial information for external users. The increased public attention to governmental decisions and public resource management has resulted in greater demand for financial transparency and accountability, and subsequently has resulted in improved financial information.”*

Dapat dikatakan transparansi dan akuntabilitas publik telah menghasilkan informasi keuangan menjadi lebih meningkat artinya transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irvan Permana (2012) adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban/akuntabilitas atas pembuatan laporan keuangan, transparansi pun dibutuhkan untuk meningkatkan pengawasan.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Fiekri S. Zulfikar (2014), Aprilianita (2015) dan Firna (2015) yaitu transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah , dan berpengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berperan penting terhadap pengelolaan laporan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan akan berkualitas.

Dari uraian diatas, dapat disusun kerangka pemikiran alur hubungan antara Akuntabilitas Publik dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2014:64) adalah Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa

hipotesis adalah jawaban sementara yang bersifat praduga karena masih harus diuji kebenarannya.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena belum berdasarkan fakta-fakta empiris.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H2: Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H3: Akuntabilitas Publik dan Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan